

**KONTRIBUSI DANA PERIMBANGAN APBN DAN PAJAK NBUMI
BANGUNAN (PBB) TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG**

**(Studi Deskriptif Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Jombang
Tahun 2015-2017)**

Oleh :

Rico Adi Suwardianto*)

Ronny M Mardani**)

Budi Wahono***)

Email : ricoadi981@gmail.com

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The objectives of this study are: 1) To determine the contribution of the effect of the APBN Balance Fund on infrastructure development in Jombang Regency. 2) To find out the contribution of the Bumi Bangunan (PBB) tax compared to other regional revenues on infrastructure development in Jombang Regency. This research uses descriptive research. Descriptive research is research conducted to determine the value of an independent variable, either one variable or more without making comparisons or connecting with other variables.

The results of this study indicate that: 1) Contribution of the State Budget Balancing Fund to Infrastructure development in Jombang Regency. 2) Contribution of Land and Building Tax (PBB) compared to other regional income towards infrastructure development in Jombang Regency. This shows that the contribution of the APBN balance fund and the land and earth building tax (PBB) is very effective.

Keywords: APBN Balancing Fund and Land and Building Tax (PBB)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Infrastruktur secara umum merupakan kebutuhan dasar fisik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitasnya. Menurut *American Public Works Association* (Stone, 1974), infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Namun, kualitas infrastruktur di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya indeks infrastruktur Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN. Berdasarkan data *Logistic Performance Index (LPI)* tahun 2014, indeks infrastruktur Indonesia berada di peringkat 53 di bawah Singapura, Malaysia (25), Thailand (35), bahkan lebih rendah dengan Vietnam yang berada di peringkat 48. Rendahnya indeks infrastruktur ini berdampak pada tingginya biaya logistik yang bermuara pada ekonomi biaya tinggi dan mahal nya biaya barang dan jasa.

Pembangunan infrastruktur diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Atas dasar ini, Pemerintahan sekarang menjadikan program pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik pada seluruh cakupan wilayah di Indonesia. Pembangunan Infrastruktur dan kesejahteraan pada salah satu media nasional, realisasi anggaran pembangunan infrastruktur beberapa tahun belakangan ini selalu naik dari tahun ke tahun terutama sejak awal 2010.

Hubungan pendapatan daerah dengan pajak pusat merupakan dana perimbangan. Dimana berdasarkan Undang – undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

APBN (Anggaran Belanja Pendapatan Negara) merupakan suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis – jenis pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun (1 Januari – 31 Desember), yang ditetapkan undang – undang dengan melaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pemasukan bagi Negara yang cukup berpengaruh terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan pajak pendapatan lainnya. Hal yang mencakup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan tersebut yang berada di seluruh Indonesia.

Di Kabupaten Jombang sejak tahun 2014 menyerap Anggaran hingga 60% untuk pembangunan Infrastruktur. Diharapkan dengan pembangunan Infrastruktur

yang hampir merata ini bisa mengatasi masalah ekonomi. Sejak tahun 2014 dari total ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jombang sepanjang 1.215,829 kilometer yang terdiri dari 500 ruas jalan. Saat ini sudah 422 ruas jalan yang selesai dikerjakan. Jurnalmojo (2013)

Ketersediaan infrastruktur yang baik dan memadai akan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. Hal ini dapat dirasakan langsung dari turunnya biaya logistik dan waktu tempuh transportasi barang/jasa. Pertukaran barang/jasa dalam pelayanan sistem logistik nasional (ekspor/impor) juga akan menjadi lebih efektif dan efisien. Kedua manfaat tersebut tentunya akan memberikan dampak positif kepada produktivitas dan daya saing produk domestik dengan produk asing sehingga perekonomian daerah Kabupaten Jombang dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Pendapatan pajak dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi suatu daerah/negara untuk menghasilkan pendapatan pajak yang maksimal. Rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Jombang dalam PBB dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain seperti kurang tersebarnya informasi Pemerintah Daerah terhadap masyarakat. Saat ini penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Jombang kurang efektif dibandingkan Pajak daerah lainnya, Pajak daerah lainnya rata-rata sudah terealisasi dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kontribusi Dana Perimbangan APBN terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Bumi Bangunan (PBB) dibandingkan pendapatan pajak asli daerah yang lain terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jombang.

Tujuan

1. Untuk mengetahui kontribusi pengaruh dana Perimbangan APBN terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi Bangunan (PBB) dibandingkan pendapatan daerah yang lain terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jombang.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Dapat menambah pengetahuan tentang Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Jombang dan pengaruhnya terhadap dana APBN dan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bagi Peneliti lain

Dapat jadi referensi untuk dijadikan bahan penelitian sejenisnya

3. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini mungkin dapat sedikit dijadikan referensi dalam menentukan kebijakan infrastruktur daerah kabupaten Jombang.

TINJAUAN TEORI

Dana Perimbangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Dana Perimbangan APBN ialah suatu alat perencanaan tentang penerimaan dan pengeluaran di masa yang akan datang umumnya disusun dalam jangka waktu satu tahun, Suparmoko (2002). Sedangkan menurut Kementerian Keuangan (2004), Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN merupakan *instrument* untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Dalam menyusun APBN, perencanaan alokasi belanja negara diarahkan untuk mendorong alokasi sumber-sumber ekonomi agar dapat digunakan secara produktif, yaitu terjadinya realokasi faktor-faktor produksi yang akan digunakan secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi khususnya dalam stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun langkah-langkah peningkatan kualitas belanja negara dengan mengutamakan belanja modal sebagai pendukung pendanaan bagi kegiatan pembangunan, mengefisienkan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif, dan menghindari peningkatan pengeluaran wajib. Belanja modal difokuskan untuk mendukung program infrastruktur, mendukung target pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan kesejahteraan rakyat, infrastruktur pertanian, dan infrastruktur energi serta komunikasi.

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Pengertian dasar tentang Pajak Bumi dan Bangunan ini dikemukakan di beberapa istilah dalam pembahasan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

- a. Bumi, yang dimaksud dengan bumi dalam Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
- b. Bangunan, yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

- c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang dimaksud NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. Tjahjono dan Fakhri (2009:469).

Sebagian dari hasil pendapatan PBB tersebut dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai pendapatan daerah yang setiap tahun anggaran disebutkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan alokasi hasil penerimaan pajak sebagaimana di atas diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggungjawab masyarakat untuk membayar pajak, yang sekaligus mendorong sifat kebersamaan masyarakat dalam membangun.

Perkembangan perekonomian negara Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah memandang pengaturan tentang pembagian hasil penerimaan PBB dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Lokasi dalam Penelitian Kontribusi Dana Perimbangan APBN Dan Pajak Bumi Bangunan Terhadap Pembangunan Infrastruktur dilaksanakan di Kabupaten Jombang. Dengan beberapa referensi dari berbagai sumber dari Dinas terkait.

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 mei sampai dengan 13 juni 2018. Mengacu pada program Pemerintah Pusat yang meningkatkan Pembangunan Infrastruktur seluruh wilayah Indonesia.

Metode Pengumpulan Data

Dari Penelitian yang berjudul Analisis Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap pembangunan Infrastruktur di daerah Kabupaten Jombang ini menggunakan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui teknik pengambilan basis data dari media perantara atau dicatat oleh pihak lain guna mendapatkan data arsip sekunder.

Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Adapun data penelitian diperoleh dari mengunduh langsung dari publikasi data atau menyampaikan permintaan data kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Operasional Variabel

Definisi operasional menunjukkan definisi variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional dari variabel terikat dan variabel bebas yang dijadikan indikator dalam penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Dana Perimbangan APBN
Merupakan Prosentase RAPBN Dana Perimbangan terhadap realisasinya terhadap kontribusi Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Jombang mulai tahun 2015 – 2017.
2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan
Merupakan Prosentase kontribusi Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap pembangunan Infrastruktur daerah di Kabupaten Jombang serta perbandingannya dengan Pendapatan Asli Daerah lainnya di Kabupaten Jombang.

PEMBAHASAN

Kontribusi Dana Perimbangan APBN

Dalam penelitian ini membahas tentang seberapa besar kontribusi Realisasi Dana Perimbangan APBN dari tahun 2015 – 2017. Dimana ketika RAPBN dana Perimbangan disusun dan disesuaikan dengan menyesuaikan kebutuhan dan potensi pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Jombang.

Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas APBN Dana Perimbangan adalah:

$$Kuantitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Potensi APBN}} \times 100\%$$

Dari perhitungan analisis efektivitas Dana Perimbangan APBN Tahun anggaran 2015 – 2017, pendapatan Anggaran APBN cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena kebutuhan pembangunan Infrastruktur dari berbagai Aspek wilayah Kabupaten Jombang. Dengan prosentase yang signifikan dapat disimpulkan mengacu pada tabel interpretasi di atas Kontribusi Dana Perimbangan APBN terhadap Pembangunan Infrastruktur daerah kabupaten Jombang adalah efektif.

Kemudian dalam RAPBN dana Perimbangan uraian yang relative mengalami kenaikan dari tahun 2015 – 2017 adalah Dana Alokasi Khusus, sedangkan untuk Dana Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum relative mengalami naik turun dalam uraian tabel diatas.

Selain itu, dari keseluruhan rincian pendapatan dana Perimbangan APBN mulai tahun 2015 – 2017. RAPBN yang realisasinya paling rendah adalah Uraian Dana Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dengan rata-rata prosentase sebesar 84,64%. Sedangkan realisasi paling tinggi dari uraian RAPBN Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum yang setiap tahunnya mulai tahun 2015 – 2017 mencapai 100%.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pembangunan Infrastruktur daerah kabupaten Jombang. Seberapa besar nilai Anggaran dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jombang. Setelah itu dibandingkan seberapa besar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Asli Daerah Lainnya. Setelah itu dinilai Pendapatan Pajak Asli Daerah lainnya yang terendah.

Untuk mengetahui analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan pajak daerah lainnya adalah:

$$Kuantitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Potensi PBB}} \times 100\%$$

Kontribusi pajak bumi bangunan dalam kurun waktu 3 tahun relatif menurun. Dari tahun 2015 kontribusinya sebesar 30%, tahun 2016 kontribusinya sebesar 28% sedangkan pada tahun 2017 kontribusinya 23%. Dengan prosentase yang relatif menurun dapat disimpulkan bahwa Kontribusi Dana Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap Pembangunan Infrastruktur daerah kabupaten Jombang adalah efektif. Dikarenakan pendapatan Pajak Bumi Bangunan dibandingkan pendapatan Asli Daerah lainnya rata-rata mendapat peringkat ke dua dari semua pajak yang dijelaskan diatas.

Sedangkan untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang relatif mengalami penurunan dari tahun ke tahun adalah Pajak Hiburan tahun 2015 dengan RAPBN Perimbangan sebesar Rp. 75.000.000,- hanya terealisasi sebesar Rp. 47.899.390,- dengan prosentase sebesar 63,87%. Selanjutnya untuk tahun 2016 kembali menyusun RAPBN Perimbangan sebesar Rp. 75.000.000,- hanya terealisasi sebesar Rp. 47.638.920,- dengan prosentase sebesar 63,52%. Selanjutnya untuk tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal penerimaan Pajak Hiburan mengalami peningkatan dengan RAPBN sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 62.863.824,- dengan prosentase 125,73%. Hal ini dapat diartikan usaha penerimaan Pajak Hiburan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang sudah baik. Sedangkan untuk penerimaan Pajak Reklame mengalami penurunan ditahun 2017

dengan RAPBN Perimbangan sebesar Rp. 1.500.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.409.584.940,- dengan prosentase sebesar 93,97%. Selanjutnya untuk penerimaan Pajak Parkir mengalami penurunan di tahun 2016 dengan RAPBN Perimbangan sebesar Rp. 12.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.180.650,- dengan prosentase sebesar 84,14%. Sama halnya dengan penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan ditahun 2015 mengalami penurunan dengan RAPBN Perimbangan Rp. 725.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 508.805.295,- prosentase sebesar 70,18%. Dari pemaparan penelitian tersebut usaha yang dilakukan dalam penerimaan Pajak Asli Daerah kurang maksimal, dan harus melakukan beberapa cara sebagai berikut :

- Penyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
- Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk memenuhi untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- Penetapan pendapatan asli daerah dengan memperhatikan realisasi pendapatan serta perhitungan potensi jenis pendapatan asli daerah.

Implikasi

Kontribusi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Dana Perimbangan terhadap pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Jombang.

Berdasarkan hasil perhitungan Efektivitas dalam penyusunan RAPBN dalam periode tahun 2015, 2016 dan 2017 disimpulkan bahwa tingkat efektivitas yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan dalam penyusunan RAPBN sendiri sudah diperhitungkan dengan berbagai pertimbangan yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan Infrastruktur Kabupaten Jombang.

Dalam penyusunannya sendiri pun Anggaran dan realisasinya tidak selisih jauh dan masih terbilang sangat efektif. Dari hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Lestari (2015), tentang pengaruh Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) terhadap belanja langsung.

Kontribusi Pajak Bumi Bangunan (PBB) dibandingkan pendapatan daerah yang lain terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan hasil penelitian pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pemerintah Kabupaten Jombang dari tahun 2015, 2016 dan 2017 relatif meningkat. Realisasi Pendapatan lebih dari Anggaran yang direncanakan. Dikarenakan Pemerintah Kabupaten Jombang sudah menjalankan tugasnya dengan bekerjasama dengan berbagai pihak sampai ketataran Pemerintah Desa seluruh wilayah Kabupaten Jombang.

Untuk perhitungan Kontribusi Pajak Bumi Bangunan terhadap Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Jombang tingkat efektivitasnya sangat signifikan. Bisa dibuktikan dengan realisasi Pajak Bumi Bangunan selalu melebihi Anggaran dan juga pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan mendapat peringkat kedua dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah setelah Pajak Penerangan Jalan.

Hal tersebut sesuai dengan Penelitian Widari (2016) tentang Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pendapatan Daerah. Penelitian ini menganalisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, untuk mengetahui kontribusi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun simpulan-simpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Anggaran APBN (Dana Perimbangan)
 - a. Anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 1.198.837.939.735 terealisasi sebesar Rp. 1.170.782.676.685 dengan prosentase 97,66%
 - b. Anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 1.480.112.910.166 terealisasi sebesar Rp. 1.479.480.105.860 dengan prosentase 99,96%
 - c. Anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 1.554.257.306.822 terealisasi sebesar Rp. 1.486.041.199.349 dengan prosentase 95,61%

Dari simpulan diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi Anggaran APBN terhadap pembangunan Infrastruktur daerah Kabupaten Jombang dari tahun 2015 ke 2016 mengalami kenaikan tapi menurun kembali di tahun 2017.

2. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan serta perbandingan dengan Pendapatan Pajak Daerah lainnya
 - a) Pada tahun 2015 Anggaran pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 19.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 24.459.056.429 dengan Prosentase 128,73%.
 - b) Pada tahun 2016 Anggaran pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 24.000.000.000 terealisasi sebesar 25.659.706.821 dengan prosentase 106,92%.
 - c) Pada tahun 2017 Anggaran pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 25.500.000.000 terealisasi sebesar Rp. 25.959.660.507 dengan prosentase 101,80%.

Pendapatan Pajak Bumi Bangunan di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi Pajak Bumi Bangunan terhadap Pembangunan Infrastruktur daerah kabupaten Jombang menggunakan perbandingan prosentase dengan Pendapatan Pajak Daerah. Berdasarkan data yang sudah dijelaskan di Bab 4 pada tahun 2015 prosentasenya sebesar 30%, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 28%, kemudian pada tahun 2017 sebesar 23%. Perbandingan dari tahun 2015, 2016 dan 2017 relatif menurun.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini membahas tentang Kontribusi Dana Perimbangan APBN dan Pajak Bumi Bangunan terhadap Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Jombang. Dan banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya membahas Kontribusi dari tahun 2015 sampai dengan 2017.
2. Penelitian ini juga tidak membahas tentang Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara dikarenakan hanya melihat seberapa besar kontribusinya terhadap Pembangunan Infrastruktur daerah Kabupaten Jombang.
3. Penelitian ini hanya membahas tentang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari semua Pendapatan Pajak Daerah yang lainnya.
4. Penelitian ini juga tidak menjelaskan seberapa besar kontribusi Pendapatan Pajak Daerah lainnya terhadap Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Jombang.

Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini, dari berbagai pemaparan peneliti diatas. Bahwa pencapaian target pendapatan daerah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara total mengalami kenaikan pada seluruh komponen baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah baik dari sisi jumlah maupun peningkatan pertumbuhan. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu kita cermati terkait kenaikan tersebut, karena adanya beberapa kebijakan Pemerintah yang menyebabkan kenaikan pendapatan tapi tidak menambah kemampuan keuangan nyata Pemerintah daerah. Terkait komponen Pendapatan Asli Daerah perlu mendapatkan perhatian, khususnya pada saat penyusunan target pendapatan asli daerah untuk Tahun Anggaran 2018 terkait beberapa komponen PAD yang perlu disesuaikan pada perubahan APBD tahun anggaran 2018.

Selain itu untuk meningkatkan pendapatan Pajak Daerah salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah harus berupaya dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut :



- a. Meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan cara memberikan informasi secara menyeluruh dan kemudahan dalam penarikan pajak.
- b. Meningkatkan kualitas SDM petugas penerima pajak, agar masyarakat tidak enggan untuk membayar pajak dikarenakan petugasnya kurang maksimal dalam melakukan tugasnya.
- c. Pemerintah Kabupaten Jombang bekerjasama dengan aparat daerah seperti Kelurahan dan Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2000. *Program Pembangunan Nasional 2000-2004*, Bappenas, Jakarta.
- Bilal, A. Wahid, 2012. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar Periode 1996-2010*. Paper. Fakultas Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanudin.
- Handayani, Witiya Tri dkk. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta*. Surakarta : Jupe UNS, Vol 2, No 3, Hal 224 s/d 237
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Grealia Indonesia.
- Ihsikawa, T. (2013). *Infrastructure Utilization and Rice Production Development*. Management of Infrastructure and Community Development, Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Indrawati, Lucia Rita, 2010. *Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi*. *Majalah Ilmiah Dinamika*, Vol.33 No.1: 55-66. Universitas Tidar Magelang. Magelang.
- Kementrian Keuangan. 2017. *Pemulihan Ekonomi Berlanjut APBN 2017 Masih Tetap Terjaga (Diseminasi Dana Desa di Gedung Olahraga Gemilang)*. Magelang
- Lestari, Ni Nyoman Sri Ayu dkk. 2015. *Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Singaraja : e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha.
- Lestari, Voni. 2014. *Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Dan 2013*
- Mukhlis, Imam, 2009. *"Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis"*. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Tahun 14 Nomor 3 Nopember 2009. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Malang.
- Mulyono, Anton dkk. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Nurmalasari, Rany. 2014. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Proses Pelayanan Pengalihan Pengelolaan Serta Pemasukan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah*. Malang : Universitas Brawijaya

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42. Tahun 2005. tentang *Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67. Tahun 2005. tentang *Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Sekretariat Negara. Jakarta.

Purwoto, H. Dan Kurniawan, D.A., (2009). *Kajian Dampak Infrastruktur Jalan Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah*. Simposium XII FSTPT 14 November 2009. Universitas Kristen Petra. Surabaya.

Radiansyah, Dedi, 2012. “*Analisis Kontribusi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia (Periode Tahun 1996 s.d. 2008)*”. Tesis. Fakultas Ekonomi, Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, Jakarta.

Riyadi, D.S. (2012). *Peran Infrastruktur dalam Percepatan Pembangunan Wilayah di Indonesia*. Seminar Nasional Kota Untuk Rakyat: Peran Infrastruktur dalam Percepatan Pembangunan Wilayah. PWK UGM Yogyakarta.

Sa’ud, Udin Syaefudin. 2007. *Modul: Metode Penelitian Pendidikan Dasar*. Bandung: UPI.

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Tarigan, Kharisma Wanta. 2013. *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pbb Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Kota Manado*

Utiahman, Nur Riza dkk. 2016. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tomohon*. Manado : Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi

Widari, Berliana Esti. 2016. *Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya*



Witarto. 2008. *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Bumi Aksara.

<https://www.scribd.com/doc/58208222/Potensi-Penerimaan-Pajak-Bumi-Dan-Bangunan-Studi-Kasus-Kota-Bandung>

<https://jurnalmojo.com/2017/10/26/sejak-2014-pembangunan-infrastruktur-jombang-menyerap-anggaran-hingga-60-persen/>

Rico Adi Suwardianto*) Adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA
Ronny M Mardani**) Adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA
Budi Wahono***) Adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA